

## Policy Implementation of Lembah Putri Beach Tourism Development in Putrapinggan Village, Pangandaran Regency

Mona Indrianie<sup>1\*</sup>, Rifqi Kahirul Arifin<sup>2</sup>

Pasundan University

**Corresponding Author:** Mona Indrianie [monaindrianie@unpas.ac.id](mailto:monaindrianie@unpas.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*keywords:* Policy Implementation, Government, Development

*Received :* 08, July

*Revised :* 22, July

*Accepted:* 25, August

©2023 Indrianie, Arifin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Implementation of the Policy for Development of the Lembah Putri Beach Tourism Object in Putrapinggan Village, Pangandaran Regency. The aim of this research was to find out the implementation of the Policy for Development of the Lembah Putri Beach Tourism Object and to find out the supporting and inhibiting factors in implementing the policy. This study is analyzed using policy theory that focuses on policy implementation from George C. Edward III which consists of communication indicators, resource indicators, disposition indicators, and bureaucratic structure indicators. In this study using a qualitative descriptive method, namely the type of research that seeks to describe the object or subject under study in accordance with what it is. Data collection techniques in this study were carried out by interviews, observation, literature study, and documentation. As well as data analysis used using memos, coding, and transcripts. Based on the research results obtained, it can be seen that the Implementation of Policy for Development of the Lembah Putri Tourism Object has not been implemented optimally, there are perceived obstacles such as: There is still a low level of human resources who have knowledge in the field of tourism and do not yet have inter-sectoral functions.

## Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Pantai Lembah Putri di Desa Putrapinggian Kabupaten Pangandaran

Mona Indrianie<sup>1\*</sup>, Rifqi Kahirul Arifin<sup>2</sup>

Pasundan University

**Corresponding Author:** Mona Indrianie [monaindrianie@unpas.ac.id](mailto:monaindrianie@unpas.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Implementasi Kebijakan, Pemerintahan, Pembangunan

*Received :* 08, Juli

*Revised :* 22, Juli

*Accepted:* 25, Agustus

©2023 Indrianie, Arifin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Lembah Putri di Desa Putrapinggian Kabupaten Pangandaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Lembah Putri serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori kebijakan yang fokus pada implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri dari indikator komunikasi, indikator sumber daya, indikator disposisi, dan indikator struktur birokrasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha mendeskripsikan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Serta analisis data yang digunakan menggunakan memo, coding, dan transkrip. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terlihat bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Lembah Putri belum terlaksana secara maksimal, terdapat kendala yang dirasakan seperti: Masih rendahnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dibidangnya bidang pariwisata dan belum mempunyai fungsi lintas sektoral.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi alam yang berlimpah sehingga pemerintah terus mengembangkan potensi wisata alam agar lebih dikenal dunia. Pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan sektor ekonomi di Indonesia sebagai salah satu penghasil devisa negara. Perkembangan sektor wisata juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah untuk produk serta jasa penunjang pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat, sehingga dengan itu dapat mengurangi angka pengangguran. Sektor pariwisata memberi dampak positif bagi masyarakat terutama masyarakat lokal yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisata. Pembangunan sektor pariwisata memiliki manfaat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam konteks wilayah/daerah, pada prinsipnya pengembangan merupakan suatu proses melakukan perubahan secara terencana terhadap wilayah/daerah baik dari segi sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur dan lain sebagainya. Pengembangan harus dilakukan dengan perencanaan. Kegiatan pariwisata memberikan dampak positif dan pengembangan daerah tujuan pariwisata memiliki peran penting dalam berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, serta aspek lingkungan alam.

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran di payungi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025. Perda tersebut merujuk pada Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang diamanatkan pada pasal 8 bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Dalam Kebijakan Pembangunan Pembangunan Kepariwisata Daerah pada Pasal 10 meliputi: a). Destinasi Pariwisata b). Industri Pariwisata c). Pemasaran Pariwisata dan d). Kelembagaan Pariwisata.

Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten terbaru terbentuknya Kabupaten Pangandaran merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis dan menjadi daerah otonomi baru di Indonesia. Pangandaran memiliki potensi terbesar di sektor pariwisata. Mengingat keindahan obyek wisata, salah satunya adalah obyek wisata pantai Lembah Putri yang berlokasi di Desa

Putrapinggan, Kecamatan Kalipucang merupakan salah satu daya tarik pantai yang memiliki potensi alam yang cukup banyak, termasuk situs sejarah Goa Jepang, Muara Cipernekean, dan Batu Meja. Faktor unik dari area pantai tersebut adalah terdapat miniatur Tembok Cina yang dibangun diatas bukit. Pengembangan Objek Wisata Pantai Lembah Putri pada saat ini untuk pengelolaan sudah baik namun belum optimal oleh masyarakat, Pokdarwis, dan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki wisata Pantai Lembah Putri masih belum memadai, seperti penginapan/hotel, mushola, kamar mandi umum, serta kios pedagang, dan tempat parkir yang belum memadai. Dan juga akses jalan menuju pantai masih rusak. Dan terdapat permasalahan lain dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sekitar Pantai Lembah Putri belum optimal, disebabkan minimnya pengetahuan tentang kesadaran serta kepedulian terhadap wisata.

Hambatan lain yang dihadapi dalam pengembangan wisata Pantai Lembah putri adalah terbatasnya dana yang tersedia, sehingga menghambat pembangunan infrastruktur wisata Pantai Lembah Putri. Selain itu permasalahan lainnya adalah belum berjalan optimalnya promosi wisata Pantai Lembah Putri. Adapun situs website yang bertujuan untuk mempromosikan dan memberikan informasi - informasi terkait pariwisata di wisata Pantai Lembah Putri belum dikelola secara optimal, hal tersebut terlihat dari konten - konten yang terdapat di dalam website belum memberikan informasi yang lengkap.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Dewi Silvia pada tahun 2019 dengan mengambil judul "Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis". Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini menyatakan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan wisata, kurangnya persamaan persepsi diantara implementor serta masih kurangnya hubungan koordinasi dengan instansi - instansi terkait.

Hasil kesimpulan penelitian penelitian ini implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini adalah menggunakan teori George C. Edward III dan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian terdahulu yang kedua yang dilakukan oleh Itah Masitah pada

tahun 2019 dengan mengambil judul “Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal.

Hasil kesimpulan penelitian ini pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandara kurang dilaksanakan dengan baik, pemerintah desa masih kurang memberi dukungan dan mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Babakan. Selain itu pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata sehingga keberadaan desa wisata di Desa Babakan kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Relevansi penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian diatas menggunakan teori pendapat Hadiwijoyo (2005:72) .

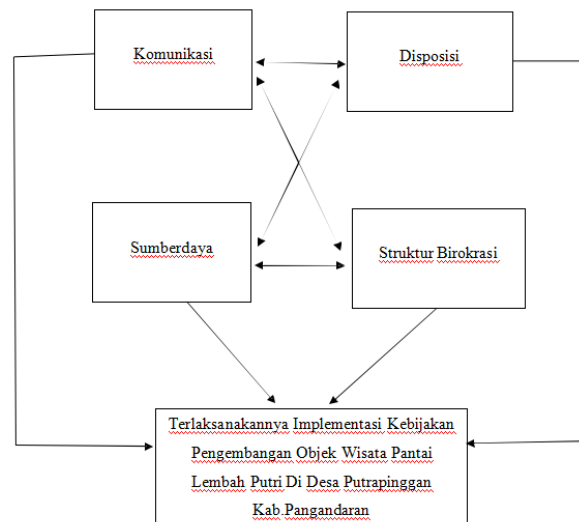
Penelitian terdahulu yang ketiga yang dilakukan oleh Ersanda Praptining Elsa pada tahun 2018 dengan mengambil judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pulau Merah)”.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah memaksimalkan kelebihan melalui sector pariwisata, pembuatan kebijakan pengelolaan wisata dibutuhkan relasi organisasi yang baik untuk bekerja sama dengan dinas terlibat, semakin banyak tingkat promosi yang dilakukan pemerintah sehingga mempengaruhi pendapatan daerah melalui sector pariwisata. Relevansi penelitian ini dengan penelitian diatas pada persamaan menggunakan metode kualitatif dan teori Geoge C. Edward III.

Implementasi kebijakan adalah sebagai suatu proses atau langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan, oleh karena itu banyak model implementasi yang dikembangkan oleh para ahli untuk dapat agar sebuah kebijakan dapat terwujud sesuai dengan rencana dari kebijakan yang dibuat sebelumnya. Implementasi kebijakan menghubungkan antara kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.

Menurut Edward III (1984:9-10) implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Faktor - faktor sebagai sumber masalah sekaligus keberhasilan bagi proses implementasi yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kajian dalam melihat berhasil tidaknya implemementasi kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Lembah Putri di Desa Putrapinggian Kabupaten Pangandaran pada Peraturan Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025 pada Pasal 10 tentang kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah Dianalisis secara mendalam yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan alasan tersebut penulis memutuskan untuk menggunakan teori George C. Edward III, dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ke empat variabel tersebut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

## METODOLOGI

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Pada analisis kualitatif Studi kasus menggunakan alat analisis pervariabel yang sudah di hubungkan keduanya lalu dianalisis berdasarkan observasi dan wawancara.

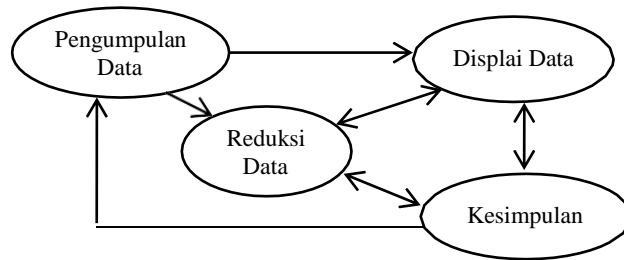
### *Proses Analisis Data Kualitatif*

#### 1. Analisis Sebelum Lapangan

Analisis- analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang berkaitan dengan fokus penelitian.

#### 2. Analisis Selama di Lapangan

Penelitian ini menggunakan model “analisis interaktif” dari Miles dan Huberman seperti divisualisasikan pada gambar berikut.<sup>1</sup>



Gambar 2. Model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman<sup>1</sup>  
Matthew B. Miles dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, hal. 20.

Sumber : Komponen analisis data menurut *Miles & Huberman*

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Lokasi penelitian ini yaitu di objek wisata Pantai Lembah Putri di Desa Putrapinggan Kabupaten Pangandaran. Penelitian lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti yaitu dengan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi, peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di unit analisis.

2. Wawancara mendalam dilakukan pada semua satuan unit analisis, dilakukan kepada ketua dan anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lembah Asri, staff kantor Desa Putrapinggan. Informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan objek yang sedang diteliti..

1) Key Informan. Peneliti dalam hal ini menggunakan kepada ketua dan anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lembah Asri.

2) Informan yaitu staff kantor Desa Putrapinggan.

c. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang tidak bisa didapatkan dengan teknik wawancara maupun teknik observasi. Dokumentasi penulis lakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari apa yang terjadi di lapangan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data dengan proses kodifikasi (koding) melalui catatan harian, memos, transkrip, dan kategorisasi data, dengan penjelasan sebagai berikut :

**a. Catatan Harian**

- 1) Menjadi unsur penting dalam membantu peneliti merekam data di lapangan.
- 2) Dibuat saat mengumpulkan data, wawancara, observasi dan penginderaan
- 3) Dibuat dengan menulis, membuat notes, merekam, menggambar, membuat sandi dan kode, membuat singkatan-singkatan
- 4) Merupakan bagian-bagian yang terlepas-lepas satu dengan lainnya

**b. Memos**

- 1) Catatan harian yang rapi membantu MDAP tahap berikutnya  
Terutama memos
- 2) Pengalaman di lapangan dari get in (get out) by disguise # declare yourself menyulitkan peneliti membuat catatan harian yang rapi
- 3) Tidak ada satu teknik menulis note pada kasus get in (get out) by disguise yang membantu peneliti dari kesulitan membuat catatan harian

**c. Transkrip**

Salinan catatan harian yang diperoleh dari lapangan, yang Dibuat sangat objektif menyerupai keadaan yang terjadi saat Pengumpulan data  
Isi Transkrip:

1. Isi dan jalannya percakapan dalam wawancara Isi dan jalannya diskusi
2. Peristiwa yang terjadi saat wawancara berlangsung.

**d. Coding**

Data coding atau pengodean data memegang peranan penting dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif, dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian (Anselm Strauss (1987: 27)

## HASIL PENELITIAN

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Lembah Putri Di Desa Putrapinggian Kab.Pangandaran dengan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh empat variable, yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini melalui pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan proses wawancara mendalam terhadap informan yang berhubungan langsung dengan

penyelenggara pengembangan Objek wisata Pantai Lembahputri di Desa Putrapinggian hasilnya sebagai berikut :

### 1. Komunikasi



Gambar 4.1 Kategori Komunikasi

### Gambar 3. Kategori Komunikasi

Variabel komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan fungsi yang paling mendasar. Komunikasi yang baik dan teratur merupakan keberhasilan dari suatu pencapaian tujuan dari sebuah implementasi kebijakan publik. Jadi pelaksana kebijakan akan melaksanakan kebijakan dengan baik dan sesuai aturan yang dibuat oleh pelaksana kebijakan.

Sehingga tujuan yang ingin dicapai bersama akan berjalan dengan lancar dan tercapai. Informasi kebijakan perlu disampaikan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Komunikasi tersebut dilakukan dalam tiga jenis komunikasi yaitu:

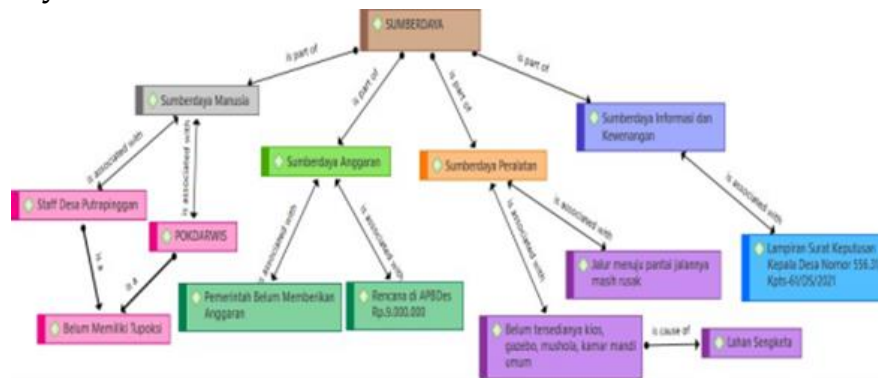
#### a. Koordinasi

Dalam penelitian ini komunikasi Desa Putrapinggian dilakukan dengan cara rapat koordinasi, rapat koordinasi ini bertujuan menyampaikan program - program pengembangan, salah satunya program desa wisata untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sesuai dengan Perda Prov. Jawa Barat No.8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata serta Peraturan Gubernur Jawa Barat No.90 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata.

b. Sosialisasi

Sedangkan untuk komunikasi dilakukan melalui sosialisasi dari Desa Putrapinggan sendiri dalam Program Desa Wisata kepada POKDARWIS mensosialisasikan Program Bantuan yang berbentuk anggaran rencana Anggaran untuk pembangunan fasilitas (gazebo) yang dilaksanakan sebanyak 3 kali. Sosialisasi juga dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2.Sumber Daya Manusia



Gambar 4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila dalam pengimplementasiannya kekurangan sumber daya untuk melaksanakan dan menjalankan, maka implementasi tidak berjalan efektif. Dalam sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sumber daya peralatan/ sarana.

Sumber daya manusia merupakan salah satu yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Desa Putrapinggan berjumlah 13 orang staff. Namun sumber daya manusia Desa Putrapinggan melibatkan Kelompok Sadar Wisata Sebagai suatu organisasi dibawah naungan Pemerintah desa yang sebagai pengelola Pantai Lembah Putri. Kelompok Sadar Wisata DTW Lembah Asri sudah memiliki regulasi yang jelas dalam pembagian tugasnya sesuai struktur organisasi yang dibuat oleh Pemerintah Desa Putrapinggan selaku yang mengeluarkan SK.

### 3. Disposisi



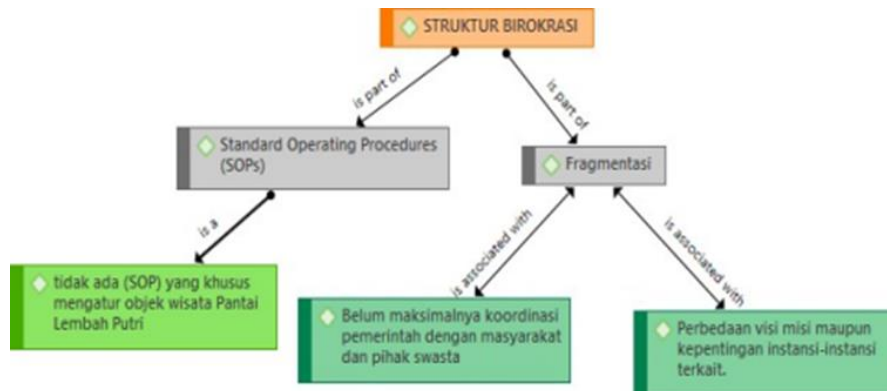
Gambar 5. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksanaan kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh - sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksanaan kebijakan. Terdapat dua indikator yang mempengaruhi disposisi, yaitu: Pengangkatan Birokrasi adalah pemilihan dan penetapan keanggotaan tim teknis pelaksana implementasi.

Komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan penting dilakukan sejak menentukan arah kebijakan sendiri akan seperti apa kedepannya begitupun dengan sikap para pelaksana kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan belum berjalan dengan baik, dalam persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata belum berjalan baik.

Hal tersebut disebabkan terbatasnya kewenangan diantara instansi-instansi yang menyebabkan sulitnya menyatukan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata Pantai Lembah Putri. Disposisi juga tidak berjalan lancar karena penempatan orang - orang dalam pelaksanaan program pengembangan objek wisata Pantai Lembah Putri masih belum maksimal, dikarenakan masih kurangnya membangun kerjasama dengan berbagai pihak.

#### 4. Struktur Birokrasi



Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Terdapat dua karakteristik utama birokrasi yaitu *Standart Operational Procedure* (SOP) dan penyebaran tanggung jawab.

#### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Lembah Putri di Desa Putrapinggan Kab.Pangandaran. Koordinas Program Desa Wisata membentuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sesuai dengan Perda Prov. Jawa Barat No.8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata serta Peraturan Gubernur Jawa Barat No.90 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata. Dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Putrapinggan No.556.31/Kpts-61/DS/2021 tentang Restruksi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) DTW Lembah Asri. Pokdarwis melaksanakan giat koordinasi kepada Polairud Polres Pangandaran menggunakan Tanah Sempadan Pantai (Harim) yaitu di Pantai Lembah Putri. Sosialisasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran menyamakan persepsi tentang Desa Wisata, kemudian untuk melihat status kesiapan desa, arahan dan pengecekan tentang sejauh mana persiapan Desa Putrapinggan terhadap program Desa Wisata. Promosi digital oleh Desa Putrapinggan dan POKDARWIS DTW Lembah Asri melalui *Youtube* dan *Website* namun belum memang terkait promosi pantai belum secara maksimal.

Masih rendahnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidangpariwisata serta belum memiliki tupokasi antar bidang terkait pengembangan. Pemerintah belum memberkan anggaran hanya baru rencana dari desa, rencana alokasi dana tersebut untuk pembuatan fasilitas dalam bentuk gazebo. Kurangnya pengembangan objek wisata juga terbatas belum tersedianya kios, gazebo, mushola, kamar mandi umum, belum tersedia. Dan

juga status lahan yang ada di kawasan objek wisata masih menjadi sengketa, jalur menuju pantai jalannya masih rusak. Komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan belum berjalan dengan baik, dalam persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata belum berjalan baik.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga masih perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang topic tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Uddin B. Sore, Sobirin, 2017, Kebijakan Publik, Cet. I, Makassar: CV SAH MEDIA
- Dr. Syahrudin, S.E., M.Si, 2019, Implementasi Kebijakan Publik, Cet II, Ujungberung, Bandung : Nusa Media
- Edward George C III dan Sharkansky Ira, 1978, The Policy predicament: making and implementing public policy, San Francisco: W.H. Fruman
- Agustino, Leo 2008, Dasar-dasar kebijakan publik, Bandung. Alfabeta
- Edward George C, 1980, Implementing Public Policy, Washington. Congressional Quarterly Press
- Meli Wahyuningsih. (2022) Efektivitas Pada Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Cepat Dari Rumah (SILANCAR) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
- Silvia, Dewi, "Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, No III, September 2019
- Masitah, Itah, "Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, No III, September 2019
- Permatasasi P, Desi, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran, No III, Agustus 2018